

INTERNASIONALISASI PERGURUAN TINGGI; STUDI MULTISITUS PADA PERGURUAN TINGGI ISLAM DI YOGYAKARTA

Djalal Fuadi
Universitas Muhammadiyah Surakarta
djalal.fuadi@gmail.com

ABSTRACT: The purpose of the study is (1) To describe and explain the governance process of internationalization of higher education in the form of self-governance, with the sub-focus: a. Strategic Plan (vision, mission and objectives), b. Institutional management, c. Curriculum and learning process, and d. Quality Assurance; (2) To describe and explain the meaning of reform of higher education institutions from national to international scale, with sub focus: a. Internationalization policy implementation, b. Academic cooperation on an international scale, c. Benchmarking, and d. The marketing process in the form of promotions and publications in the international level.

The research is conducted with qualitative approach and multi-site study design (multisites), because the settings studied have the same characteristics. The scope of research limited on policy / legal framework of governance internationalization of universities. The research was done in three Islamic University in Yogyakarta. Data collection through: (1) the technique of participant observation (participant observation), (2) in-depth interviews (depth interview), and (3) study the document. Analysis of the data used, namely (1) the analysis of data on the site, (2) analysis of data across sites.

RESULTS: (1) governance internationalization elaborated in the form of: (a) the vision, mission, goals and strategic plans, quality policy and quality objectives oriented international quality; (b) the management of international programs submitted to an agency / field / office / unit which specifically manage international programs; (c) the curriculum and the learning process is developed with the model and the different tendencies; (D) the procedures of internationalization was elaborated and escorted through quality assurance. (2) The reformation of higher education from the national level to the international level: (a) implementation done is dynamic, optional and never ending program means basic commencement of implementation is determined by the policies, views or orientation leadership position in view of the college in the international level: (b) the implementation of internationalization is implemented through cooperation programs with various shapes; (C) benchmarking does not specifically refer explicitly to the particular college which has an international reputation or the title of World Class University; (D) the process of marketing (marketing) does not specifically, but it takes place in an integrated manner, and it is natural, foreign students utilized as a marketing medium indirectly.

Keywords: internationalization of universities, colleges, Islam University

ABSTRAK: Tujuan penelitian adalah (1) Mendiskripsikan dan menjelaskan tata kelola proses internasionalisasi perguruan tinggi dalam wujud self-governance, dengan sub fokus: a. Rencana Strategi (visi, misi dan tujuan), b. Manajemen kelembagaan, c. Kurikulum dan proses pembelajaran, dan d. Penjaminan Mutu; (2) Mendiskripsikan dan menjelaskan makna reformasi institusi perguruan tinggi dari skala nasional ke internasional, dengan sub fokus: a. Implementasi kebijakan internasionalisasi, b. Kerjasama akademik dalam skala internasional, c. Benchmarking, dan d. Proses pemasaran berupa promosi dan publikasi dalam tataran internasional.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan rancangan penelitian studi multisitus (multisites), karena setting yang diteliti memiliki karakteristik yang sama. Lingkup penelitian dibatasi pada kebijakan/kerangka kerja legal tata kelola internasionalisasi perguruan tinggi. Penelitian dilakukan di tiga Perguruan Tinggi Islam di Yogyakarta. Teknik pengumpulan data melalui: (1) teknik observasi partisipan (participant observation), (2) wawancara mendalam (indepth interview), dan (3) studi dokumen. Analisis data yang digunakan, yaitu (1) analisis data dalam situs, (2) analisis data lintas situs.

Hasil penelitian: (1) tata kelola internasionalisasi dijabarkan dalam bentuk: (a) visi, misi, tujuan dan rencana strategi, kebijakan mutu serta sasaran mutu berorientasi pada kualitas internasional; (b) pengelolaan program internasional diserahkan kepada suatu lembaga/bidang/kantor/unity yang secara khusus mengelola program internasional; (c) kurikulum dan proses pembelajaran dikembangkan dengan model dan kecenderungan yang berbeda-beda; (d) tata kelola internasionalisasi dijabarkan dan dikawal melalui penjaminan mutu. (2) Reformasi perguruan tinggi dari skala nasional ke tingkat internasional: (a)

implementasi yang dilakukan bersifat dinamis, optional, dan never ending programme artinya dasar dimulainya implementasi ditentukan oleh kebijakan, pandangan atau orientasi pimpinan dalam memandang posisi perguruan tingginya dalam tataran internasional: (b) implementasi internasionalisasi dilaksanakan melalui program kerjasama dengan berbagai bentuk yang bervariasi; (c) benchmarking tidak mengkiplat secara khusus atau tidak mengacu secara eksplisit pada perguruan tinggi tertentu yang telah memiliki reputasi internasional atau predikat World Class University; (d) proses pemasaran (marketing) tidak dilakukan secara khusus, tetapi berlangsung secara terpadu dan bersifat alami, mahasiswa asing dimanfaatkan sebagai media marketing secara tidak langsung.

Kata kunci: internasionalisasi perguruan tinggi, perguruan tinggi/Islam

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi di Indonesia saat ini adalah terbatasnya kesempatan kerja yang dapat menyerap lulusan perguruan tinggi sehingga menyebabkan jumlah pengangguran sarjana-sarjana kian menumpuk. Belum lagi kendala yang dihadapi pihak perguruan tinggi itu sendiri yaitu kesulitan pembiayaan sehingga sulit berkembang untuk menjadi perguruan tinggi yang berkualitas. Data menunjukkan bahwa lulusan Perguruan Tinggi (PT) justru potensial menjadi pengangguran kota (Nugroho, Suara Merdeka, Senin 31 Juli 2006). Data Sakernas (2004) memperlihatkan lulusan D1 dan D2 73% menjadi pengangguran, lulusan D3 (83%) dan S1 (82,4%). Data ini menunjukkan betapa jauh kesenjangan antara harapan menjadi orang sukses dan kenyataan sulitnya mendapatkan pekerjaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan ternyata tidak diikuti oleh kemampuan mendapatkan pekerjaan (apalagi menciptakan) pekerjaan. Dengan kata lain, semakin tinggi pendidikan yang tempuh peluang untuk menjadi penganggur terdidik justru semakin besar. Data Sakernas juga menunjukkan hanya 5,1 % lulusan D1 dan D2 yang mampu membuka usaha sendiri, sementara lulusan D3 yang mampu membuka usaha mandiri 6,3% dan S1 hanya 5,8%. Sebagian lulusan Akademi dan perguruan tinggi memang menjadi buruh atau karyawan. Pertanyaan muncul bagaimana akan memiliki daya saing tinggi di tingkat global apabila untuk mempersiapkan peserta didik menjadi pengusaha mandiri saja masih kesulitan? Hal semacam ini menjadi sebuah persoalan serius bagi perguruan tinggi.

Sementara Perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 6,5% hingga

triwulan III-2011. Tetapi sayangnya pertumbuhan ini tidak sejalan dengan kualitas hidup manusia yang berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2011 dari PBB telah merosot turun dari peringkat ke-108 menjadi ke-124 (*Kompas* Selasa, 8 Nopember 2011). Aspek kualitas pertumbuhan ekonomi ini juga akan berdampak pada salah satunya adalah akses bagi anak perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan, serta terhadap lapangan kerja apabila mereka lulus. IPM merupakan kumpulan (*agregat*) dari tiga komponen: umur harapan hidup (komponen Kesehatan), rata-rata jumlah tahun lama bersekolah dan jumlah tahun lama bersekolah yang diharapkan (komponen pendidikan), serta pendapatan nasional bruto (PNB, *Gross National Income*) tiap orang yang menggambarkan tingkat pendapatan tiap orang dan kegiatan ekonomi. Selama 20 tahun pengukuran IPM untuk komponen pendidikan, IPM sebelumnya mengukur angka melek huruf, capaian Indonesia di atas 92%. Tetapi tahun ini IPM mengukur lama rata-rata sekolah. Selama 20 tahun, umur rata-rata sekolah naik 2,7 tahun. Untuk jumlah tahun lama bersekolah yang diharapkan meningkat 4,5 tahun, sedang PNB naik 18,8%.

Pendidikan dan kesehatan adalah komponen IPM bukan pendapatan. Memasukkan dua komponen itu bertujuan mengukur kemampuan negara meningkatkan kehidupan warganya tanpa manfaat pendapatan tinggi atau pertumbuhan ekonomi cepat. Dua komponen tersebut berperan penting dalam mengukur IPM total. Filipina peringkat IPM-nya lebih rendah dari Indonesia meskipun PNB, umur harapan hidup saat lahir dan tahun lama bersekolah lebih rendah. Namun, rata-rata jumlah tahun

lama bersekolah di Filipina 8,9 tahun sementara di Indonesia 5,8 tahun (*Kompas*, Jum'at, 18 Nopember 2011). Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Prof Sri Moerdiningsih Adioetomo SE, MA, Ph.D (*Kompas*, 18 Nopember 2011) mengingatkan, pendidikan angkatan kerja yang mayoritas lulusan SD seharusnya dapat ditingkatkan. Dengan meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan mereka, produktifitas dapat meningkat yang ujungnya meningkatkan produktifitas nasional dan daya saing Indonesia. Kalau mereka sudah di pasar kerja, pemerintah bisa memberi mereka pendidikan lagi.

IPM menghitung rata-rata jumlah tahun lama bersekolah pada kelompok usia 25 tahun ke atas. Dengan kualitas rata-rata jumlah tahun lamanya bersekolah hanya 5,8 tahun, hampir dipastikan mereka bekerja pada bidang-bidang yang tidak membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan tinggi sehingga pendapatannya pun tidak tinggi, atau mereka bekerja sendiri (Moerdiningsih Adioetomo, *Kompas* 18 Nopember 2011).

Badan Pusat Statistik tahun 2009 menunjukkan lama sekolah rata-rata penduduk Indonesia hanya 7,72 tahun atau hanya setingkat SMP, lama sekolah ini sangat bervariasi mulai 1-3 tahun di kabupaten-kabupaten di pegunungan tengah Papua, hingga 11-12 tahun di Kota Yogyakarta. Angka partisipasi murni tahun 2010 menunjukkan : SD dan sederajat 94,76%, SLTP dan sederajat 67,73% dan SLTA dan sederajat 45,59%. Lonjakan penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 240 juta jiwa dengan pertumbuhan 1,49% menjadi ancaman serius karena kualitasnya rendah, jika tidak dikendalikan, pertumbuhan ini akan berdampak luas, terutama pada ketersediaan pangan dan energi serta layanan pendidikan dan kesehatan (*Kompas*, 21 November 2011).

Untuk itu tuntutan terhadap perguruan tinggi untuk mampu menyesuaikan perkembangan dunia menjadi sangat penting. Karena kualitas lulusan yang dihasilkan tidak saja harus memenuhi kebutuhan tenaga kerja tingkat dunia (bila dilihat lulusan untuk pasaran tenaga kerja), tetapi kualitas keilmuan (*science*, teknologi, informasi dan hasil *research*) juga berkualitas dunia.

Kecenderungan untuk melakukan reformasi tata kelola pendidikan tinggi saat ini telah menjadi trend dunia. Di Indonesia, ide untuk melakukan otonomi perguruan tinggi didorong oleh tuntutan terselenggaranya demokratisasi dan otonomi di berbagai sektor. Kelahiran Rancangan Undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) pada tahun 2004 didukung dengan keberadaan Strategi Pendidikan Tinggi Jangka Panjang atau *Higher Education Long Term Strategy* (HELTS 2010-2014), merupakan babak baru dalam dunia pendidikan di Indonesia, dan suatu arah baru bagi perjalanan perkembangan pendidikan di Indonesia. Salah satu programnya adalah penataan kelembagaan pendidikan tinggi yang sehat, efisien dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, implementasi berbagai kebijakan pendidikan khususnya pendidikan tinggi berjalan sangat lamban dan menyisakan berbagai kendala dan persoalan.

Perkembangan perguruan tinggi pada era globalisasi sebagai dampak globalisasi menuntut perguruan tinggi melakukan internasionalisasi, serta menuntut adanya pengelolaan perguruan tinggi yang didasarkan pada pengelolaan yang sarat dengan inovasi, pemanfaatan teknologi informasi, kecerdasan, *global oriented*, serta lulusan dan hasil karya penelitian yang dapat diadopsi oleh masyarakat secara internasional. Penetapan peringkat perguruan tinggi baik tingkat Internasional (*World Class University*) maupun tingkat Nasional Indonesia atau Asean melalui *Ranking Web of Universities* dari berbagai benua menjadi tren baru dalam mengukur kualitas perguruan tinggi dari berbagai aspek dan sudut pandang, termasuk reputasi yang mampu diraih secara transparan oleh perguruan tinggi. Tren ini tidak saja memaksa perguruan tinggi berlomba untuk masuk kedalam peringkat tetapi juga berlomba untuk memperbaiki kualitas dan dikenal ditingkat internasional.

Menurut Scott P, (2000) paling sedikit terdapat beberapa pilihan yang akan meningkatkan alokasi sumber-sumber masyarakat yang akan memberikan tren secara langsung perguruan tinggi dalam era globalisasi, meliputi: 1) *Internationalization*

of university, particularly in English speaking OECD Countries: international student programmes are central to internationalization of higher education institution, but the scope of internationalization at the start of a new millennium means much more than an international student programme. 2) Offshore campuses, including twinning programmes and franchised operation, often permitting private investment in university enterprises. 3) The combination of information technologies and telecommunications technology to enable the global transmission of information, leading to the potential for virtual universities, perhaps in partnerships with global media networks, and facilitating corporate universities linked to conventional campuses – in ‘porous’ universities. 4) Consortia and strategic alliances involving universities as a response to perceptions about globalization and other perceived twenty-first century challenges.

Internasionalisasi perguruan tinggi merupakan suatu proses yang menyangkut internasionalisasi kurikulum, administrasi dan manajemen, penelitian kolaborasi secara akademik, serta pertukaran mahasiswa dan dosen (Jun Liu, Zhongxin 2011). Internasionalisasi merupakan suatu proses dimana pemerintah dapat lebih mengarahkan kesiapan untuk menuju proses globalisasi (vanderWende, 2007). Perguruan tinggi harus selalu mampu meningkatkan kearah internasional dengan mengirim mahasiswa sebanyak-banyaknya ke negara asing untuk mengikuti program pendidikan di luar negeri. Atau menggunakan internet untuk memperoleh beberapa materi kuliah ke berbagai kampus dan perguruan tinggi di negara lain. *‘Internationalization is a process that governments can steer more readily than globalization In this sense, higher education has become increasingly international in the past decade as more and more students choose to study abroad, enrol in foreign educational programmes and institutions in their home country, or simply use the Internet to take courses at colleges or universities in other countries.’*

Beberapa negara di dunia, merespon berbagai sistem dan mengembangkan

institusi kearah globalisasi dengan mengkondisikan sistem tersebut melalui reformasi sistem secara nasional yang dilakukan oleh negara terutama bidang organisasi dan manajemen institusi (OECD, 2009) : *‘In nations through out the world, the responses of systems and institutions to globalization have been conditioned by ongoing reforms to national systems, and related reforms in the organization and management of the institutions themselves (OECD, 2009).*

Untuk dapat mencapai posisi kelas dunia maka perguruan tinggi harus melakukan *reforming* agar dalam penyelenggaraan pendidikannya memiliki daya saing global (*global competitiveness report*), proses pendidikan yang dilaksanakan berkualitas, serta dalam mencapai perguruan tinggi kelas dunia tetap memiliki independensi dalam mempertahankan eksistensi budaya lokalnya (nilai-nilai ke Indonesiaan) kedalam kancah pendidikan tingkat dunia (*global education*).

Beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah memahami tentang posisi yang demikian, sehingga banyak perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikannya telah mengarahkan pada berbagai aktifitas internasional, mulai dari bidang kerjasama, pembukaan kelas dan program nternasional, berbagai seminar dan kajian bertaraf internasional, hingga petukaran mahasiswa (*Student exchange*), *offshore Campuses* dan program *double degree*. Tiga diantara perguruan tinggi yang tersebar di Yogyakarta telah melaksanakan program internasionalisasi penyelenggaraan pendidikannya. Namun dalam strategi, operasional serta titik tekan program internasionalisasi dari ketiga perguruan tinggi ini memiliki perbedaan-perbedaan yang cukup menarik untuk diteliti.

b. Fokus Penelitian

Menyimak butir-butir pemahaman tentang posisi pendidikan tinggi yang multidimensi sebagaimana tersebut di atas, dan apabila melihat kembali pada paradigma lama pendidikan di tanah air yang cenderung sentralistik (segala sesuatu diatur dari atas / diseragamkan), deterministik (terlalu ditetapkan dari atas, kurang terjalin dialog), serta kurang berorientasi pada aktualisasi

potensi maupun pemecahan masalah lokal. Maka dalam era globalisasi sebagaimana sekarang ini, terutama dalam mendukung upaya menuju independensi pendidikan tinggi, paradigma lama tersebut mesti segera diubah. Fokus yang diteliti adalah: 1) Tata kelola perguruan tinggi di Indonesia dalam mengaplikasikan proses internasionalisasi perguruan tinggi dalam wujud *self-government*, dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komunitas akademik yang bersangkutan. 2) Reformasi perguruan tinggi dalam memosisikan institusinya di tingkat internasional dalam pengembangan maupun penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bentuk kerja sama akademik dalam skala internasional, melampaui batas-batas regional, politik, dan batas-batas penghambat lain.

c. Kajian Pustaka

Bila mengacu pada Deklarasi Lima Ibukota Peru Oktober 1989 tentang “*Academic Freedom and Autonomy of Higher Education*“, maka dapat dikemukakan beberapa butir prinsip dan substansi yang perlu dicermati antara lain: 1) Otonomi perguruan tinggi mengandung pengertian bahwa lembaga perguruan tinggi harus memiliki independensi atau kebebasan dalam mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan yang menyangkut pengelolaan administrasi, keuangan, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, kerja sama dan aktivitas lain yang berkaitan, tanpa campur tangan (intervensi) pemerintah atau kekuatan lain. 2) Para peneliti dari kalangan kampus memiliki hak untuk melakukan kegiatan penelitian tanpa kekangan atau campur tangan dari pihak lain, berdasarkan prinsip dan metode penelitian ilmiah yang universal. Peneliti juga berhak untuk mengomunikasikan, menyebarluaskan atau mempublikasikan hasil-hasil temuannya tanpa adanya sensor dari pihak manapun. 3) Semua lembaga pendidikan tinggi harus aktif berperan serta dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan bangsanya dan harus kritis terhadap kondisi aktual, seperti represi politik dan pelanggaran hak-hak asasi manusia. 4) Semua lembaga pendidikan tinggi harus berusaha mencegah ketergantungan ilmu dan teknologi serta

mengupayakan kemitraan yang setara dengan seluruh komunitas akademik di dunia dalam pengembangan maupun penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Harus lebih digalakkan kerja sama akademik dalam skala internasional, melampaui batas-batas regional, politik, dan batas-batas penghambat lain. 5) Seluruh lembaga pendidikan tinggi harus menjamin partisipasi para mahasiswa dalam organisasi-organisasi mereka, baik secara individual maupun kolektif, untuk menyampaikan pendapat atau opininya dalam setiap masalah yang berkala nasional maupun internasional. 6) Otonomi perguruan tinggi harus dilaksanakan dengan cara-cara yang demokratis dalam wujud *self-government*, dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komunitas akademik yang bersangkutan.

Perkembangan jaman menuntut perguruan tinggi perlu melakukan *re-forming* perubahan dan perkembangan. Perubahan ini ditengarai dengan berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai dampak globalisasi. Sistem akreditasi berdasarkan atas standar tertentu sebagai penjaminan mutu pendidikan, maka perguruan tinggi harus melakukan rekonfigurasi dari berbagai sisi *leadership, research* dan pembelajaran. Perubahan ini dimulai pada abad ke-19 yang secara berangsur-angsur menuju abad ke-20 dan akhirnya harus menjawab perubahan di abad 21. Perguruan tinggi di seluruh dunia harus mengubah paradigma dari berbagai sisi kehidupannya yang mendunia, misalnya tentang perubahan visi perguruan tinggi yang berwawasan global, proses pendaftaran mahasiswa baru, proses perkuliahan, keterkaitan dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan kerjasama antar perguruan tinggi baik secara nasional maupun internasional. Perubahan di perguruan tinggi tidak sesederhana saat itu (sebelum abad ke-19), hal ini membutuhkan perubahan yang superkompleksitas.

Higher Education (HE) Re-formed oleh Scott P (2000), merupakan hasil kajian dari perspektif Perguruan Tinggi (PT) dunia didalam melakukan perubahan. Perubahan ini meliputi: (1) pandangan Perguruan Tinggi, (2) budaya keorganisasian, (3) strategi perencanaan, (4) alokasi sumber keuangan,

(5) Manajemen keuangan, (6) kebijakan dan komite, (7) manajemen personil, dan (8) manajemen kemahasiswaan. Scott P (2000:3) menjelaskan: "A perspective is needed because present rates of change are breathtaking (and contradictory) compared to the adjustments and innovation...". Seperti diungkapkan Scott bahwa pandangan kedepan yang sangat dibutuhkan oleh perguruan tinggi adalah perubahan yang luar biasa atau superkompleksitas, karena (1) dunia ditandai dengan ragam pandangan dalam dunia global, kreativitas dan ketersediaan data melalui internet, meningkatnya masyarakat konsumtif dan melek pengetahuan, beragamnya budaya ekonomi, telah membentuk manusia yang terus menerus membentuk perubahan manusia yang terus memproduksi pola pikir interpretasi dan tindakan baru dengan kecepatan tinggi. (2) Diakui atau tidak universitas telah kehilangan jati diri yang pernah dimiliki, karena itu universitas harus menghasilkan pola pikir dan pemahaman baru yang disebabkan oleh loncatan pola pikir atau pemahaman baru, beragam dan mendunia.

Indonesia, merupakan salah satu negara yang berperan aktif dalam melakukan perubahan yang mendunia ini, melalui Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, telah merancang Strategi Jangka Panjang Perguruan Tinggi atau *Higher Education Long Term Strategy (HELTS)*, sebagai program reformasi pendidikan di perguruan tinggi Indonesia dan dilaksanakan mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2010.

Walaupun perspektif historika, perguruan tinggi di Indonesia tidak memiliki sejarah yang panjang, yaitu hanya dimulai pada abad ke-19, dengan demikian reformasi perguruan tinggi di Indonesia, merupakan salah satu bagian negara di dunia yang melakukan perubahan paradigma perguruan tingginya. Sebelum adanya *HELTS*, perubahan pandangan perguruan tinggi di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sebelum Perang Dunia II ditandai dengan munculnya pendidikan medis yang berasal dari para dokter di Jakarta. Hal ini terlihat dari jumlah mahasiswa pada tahun 1945 hanya berkisar

200 mahasiswa, dan meningkat menjadi 3,5 ribu pada tahun 1961.

Inisiatif pengembangan perguruan tinggi di Indonesia, dilanjutkan dengan diluncurkannya program oleh *HELTS* untuk periode ke II tahun 1975-1985. Program nasional ini terdiri dari bagian umum dan khusus, menekankan pada aspek relevansi yang mengakomodasi kebutuhan pengembangan daerah dan nasional yang mempunyai dua sistem yaitu akademik dan professional. Program ini juga memunculkan tiga tingkatan program pada perguruan tinggi yaitu: (1) diploma, (2) sarjana dan (3) program lulusan dengan menggunakan manajemen sistem kredit, evaluasi akademik mahasiswa, beban siswa dan sistem promosi staff. (*Directorate General of Higher Education/DGHE, 1975*).

Tahun 1986 hingga 1995 yang merupakan program perkembangan ke dua difokuskan untuk konsolidasi prestasi dan perbaikan kualitas. Ekonomi menurun drastis pada saat itu, karena jatuhnya harga minyak telah menghambat pendaftaran mahasiswa terkait dengan perluasan lebih jauh. Usaha awal untuk memperkenalkan perguruan tinggi melalui pemerintah tahun 1990 tidak mencapai harapan publik dan dukungan politik.

Strategi ketiga yang dilaksanakan pada tahun 1996 sampai dengan 2005, pengembangan yang diasumsikan bahwa ekonomi berkembang stabil dengan rata-rata 6-8 % pertahun, paling lambat 10 tahun terakhir. Tujuan untuk meraih kebutuhan yang akan datang teridentifikasi 3 issue yaitu: (1) manajemen yang lebih dinamis pada model perguruan tinggi untuk mencapainya dibutuhkan perubahan yang dinamis, (2) kebutuhan untuk meraih kualitas dan relevansi merupakan dasar referensi perguruan tinggi dan (3) kebutuhan perubahan mobilitas sosial dan pemerataan, melalui perkembangan perguruan tinggi. Strategi ini meliputi 3 program inti yaitu (1) implementasi paradigma baru pada manajemen perguruan tinggi, (2) perbaikan relevansi dan kualitas, (3) pemerataan lokasi dan sosial, walaupun pada tahun 1997, negara-negara di Asia Timur termasuk Indonesia mengalami krisis ekonomi yang

diikuti dengan jatuhnya sistem sosial dan politik.

Sebagai upaya untuk memperkuat daya saing bangsa, perguruan tinggi nasional sebagai organisasi yang sehat, menjadi syarat yang harus diterapkan pada institusi. Penyesuaian tujuan struktural tahun 2010 menjadi sistem perguruan tinggi yang sehat. Berkoordinasi secara efektif Desentralisasi melalui kekuasaan pemerintah pusat dan melakukan otonomi dengan akuntabilitas pada institusi dan infrastruktur pembiayaan dan proses manajemen yang mendorong inovasi, efisiensi dan keunggulan, dengan dasar kebijakan: (1) Persaingan bangsa, institusi perguruan tinggi berperan penting dalam pembentukan karakter bangsa. Di bidang politik perguruan tinggi selalu menjadi peran penting melalui mahasiswa dan komunitas akademis yang memandu perubahan bangsa.

Walaupun secara formal institusi perguruan tinggi merefleksi Tridarma, institusi juga berperan sebagai sumber inspirasi untuk mempersatukan bangsa terkait dengan transformasi terhadap demokrasi modern, desentralisasi dengan kompetisi perluasan otonomi, pasar yang mengendalikan ekonomi dan globalisasi. (2) Otonomi, dua kunci yang bisa membawa perubahan di perguruan tinggi yaitu kemampuan mengatur lingkungan dan memprioritaskan gaji/kesejahteraan menjadi tanggungjawab pemerintah. Rencana pembiayaan ini harus mampu mengendalikan institusi terkait dengan kualitas, efisiensi dan pencapaian tujuan dan institusi perguruan tinggi dan industri harus menjadi partner institusi. dan (3) Organisasi yang sehat, perubahan paradigma dalam konteks otonomi dan desentralisasi. Institusi harus memperbaiki kapasitas instruksional dan penjaminan mutu secara konsisten dengan standar tertentu. Keberhasilan yang telah dicapai perlu dipublikasikan dan didesiminasikan oleh DGHE dan dengan kelompoknya. Sistem yang baik dalam penguasaan perguruan tinggi meningkatkan kebebasan akademik yang mampu membawa perbaikan kualitas dalam penelitian.

Higher Education (HE) Re-formed memiliki keterkaitan dengan perubahan

perspektif perguruan tinggi di dalam menghadapi era globalisasi yang meliputi: pandangan Perguruan Tinggi, budaya keorganisasian, strategi perencanaan, alokasi sumber keuangan, manajemen keuangan, kebijakan dan komite, manajemen personil, dan manajemen kemahasiswaan telah direspon oleh *HELTS* melalui perencanaan program jangka panjang perguruan tinggi Indonesia melalui tiga keunggulan yang dilakukan perguruan tinggi agar menjadi perguruan tinggi yang eksis yaitu: (1) persaingan bangsa, (2) otonomi, dan (3) organisasi yang sehat. Dengan demikian institusi perguruan tinggi akan mampu menjawab dan eksis menghadapi tantangan dunia secara global.

Pertumbuhan permintaan terhadap perguruan tinggi secara internasional dan secara prinsip dipengaruhi oleh perubahan universitas-universitas secara alami pada era millennium baru (Scott P dalam David dan Olsen, 2000). Kemungkinan besar pilihan adalah perluasan alokasi sumberdaya manusia yang dapat memberikan kecenderungan secara langsung, kemungkinan perluasan alokasi tersebut meliputi: 1). *Internationalization of University* (Internasionalisasi Universitas): Penggunaan percakapan dalam bahasa Inggris terutama sekali pada Negara-negara OECD. 2). *Offshore Campuses* (kampus Lepas Pantai/jarak jauh): Gambaran ini meliputi semua mahasiswa yang muncul pada databased normal (mahasiswa dalam kampus) dan dari eksternal (mahasiswa jarak-jauh) mahasiswa. Jumlah total mahasiswa internasional pada *Overseas Validated Courses* (OVCs) yang diluncurkan oleh UK dan universitas-universitas di Australia hanya estimasi. Tetapi dapat berkembang secara cepat terutama untuk jumlah mahasiswa secara individual dari negara-negara berkembang yang ingin meningkatkan kualifikasi internasional tanpa melakukan perjalanan ke luar negeri. 3). *Technology* (Kombinasi Teknologi Infomasi/IT) dan telekomunikasi teknologi memungkinkan adanya transmisi informasi secara global, mendorong potensial universitas secara sebenarnya, partnership melalui jaringan media secara global, dan membuka persekutuan universitas yang berhubungan

dengan *convensi* kampus. 4). *University 21* (Universitas Abad 21):Konsorsium dan aliansi Strategis menyertakan universitas sebagai respon untuk menghadapi persepsi tentang globalisasi dan persepsi yang lain untuk abad 21, 5). *Accreditation and Quality Assurance*(Akreditasi dan Penjaminan Mutu); dan 6). *A Vision of the Culture of University in the New Millennium* (Visi kebudayaan Universitas pada era Millenium Baru).

d. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada cakupan fokus tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan dan memetakan berbagai fakta menarik mengenai tata kelola perguruan tinggi berkaitan dengan proses internasionalisasi dalam wujud *self-government*, dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komunitas akademik yang bersangkutan. 2) Mendeskripsikan Internasionalisasi perguruan tinggi, terutama reformasi perguruan tinggi dalam memposisikan institusinya di tingkat internasional dalam pengembangan maupun penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bentuk kerja sama akademik dalam skala internasional, melampaui batas-batas regional, politik, dan batas-batas penghambat lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan rancangan penelitian dengan menggunakan jenis studi kasus yakni multisitus (*multicitus*), karena setting yang diteliti memiliki karakteristik yang sama. Material empiris dihasilkan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah aktor yang terlibat dalam konsepsi dan implementasi kebijakan internasionalisasi dan independensi perguruan tinggi. Material empiris yang dimaksud diantaranya adalah berkaitan dengan kebijakan internasionalisasi perguruan tinggi, demokratisasi pendidikan tinggi, serta hubungan diantara para pemangku kepentingan dalam tata kelola pendidikan tinggi. Lingkup penelitian dibatasi pada kebijakan/kerangka kerja legal tata kelola internasionalisasi perguruan tinggi baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Kehadiran peneliti disini dimaksudkan sebagai usaha untuk memahami makna peristiwa

dan interaksi orang-orang dalam situasi tertentu. Untuk itu diperlukan ketertiban dan penghayatan peneliti secara langsung terhadap subjek di lapangan. Peneliti dalam hal ini bertindak sebagai instrument kunci (Bogdan & Biklen, 1998; Guba & Lincoln, 1981; Patton, 1980).

Sumber data menggunakan sumber primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, sedang sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data yaitu orang lain misal pimpinan perguruan tinggi diluar ketiga perguruan tinggi yang digunakan sebagai subjek penelitian atau lewat dokumen yaitu: Rencana Starategi (Visi, Misi, Tujuan) perguruan tinggi dan lain sebagainya.Sedang informan penelitian adalah segenap pimpinan universitas dan jajaran yang terkait, yang memahami dan terlibat langsung terhadap masalah yang sedang diteliti meliputi: Rektor, Wakil Rektor bidang akademik, Wakil Rektor bidang administrasi dan keuangan, Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, Wakil Rektor bidang kerjasama, Kepala Humas (Public Relations), Kepala Biro Administrasi Akademik, Kepala Biro Adinistrasi Umum, Kepala *Quality Assurance Centre* (QAC/Lembaga Jaminan Mutu), Kepala Perpustakaan, Dekan, Ketua Program Studi, segenap dosen, mahasiswa, dan wali/orang tua mahasiswa. Penjarangan data dilakukan dengan menggunakan teknik bola salju (*snowball sampling*), pengambilan sampel ini digunakan untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin, tetapi bukan untuk generalisasi. Untuk mendapatkan informasi ini sangat dipengaruhi oleh situasi, subjek, informan dan waktu.

Dalam penelitian ini digunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu: teknik observasi partisipan (*participant observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*), dan studi dokumen (Bogdan & Biklen, 1998; Nasution, 1996). Analisis data pada dasarnya adalah proses penelaahan dan penyusunan semua transkrip wawancara, catatan lapangan, dan material – material penelitian yang lain secara sistematis (Bogdan & Biklen, 1998). Analisis data terdiri atas pengujian, pengkategorian, pentabulasian, atau pengkombinasian kembali bukti – bukti empiris untuk membangun proposisi – proposisi awal suatu penelitian (Yin, 1984). Penelitian menggunakan dua macam analisis data, yaitu (1) analisis data dalam situs, dan (2) analisis data

lintas situs. Agar diperoleh temuan dan interpretasi yang absah dan kredibilitasnya terjamin, maka kehadiran peneliti dilokasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya untuk kebutuhan observasi yang mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti dan teori), pembahasan sejawat, analisis kasus negatif, dan pelacakan kesesuaian hasil. Selanjutnya akan dilakukan pengecekan dapat tidaknya temuan ditransfer ke latar lain (*transferability*), ketergantungan pada konteks (*dependendability*) dan dapat tidaknya dikonfirmasi kepada sumbernya (*confirmability*).

Pengecekan kredibilitas data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, pengecekan anggota, dan diskusi teman sejawat. Triangulasi yang dilakukan meliputi triangulasi teknik dan pengumpulan data serta triangulasi sumber data. Triangulasi pengumpulan data dilakukan dengan cara membandingkan data atau informasi yang dikumpulkan melalui teknik yang lain. Sedangkan triangulasi sumber data dilakukan dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi tertentu yang diperoleh dari seorang informan kepada informan lainnya.

Dua teknik yang digunakan dalam pengecekan kredibilitas data adalah melalui pengecekan anggota (*member check*) dan diskusi teman sejawat. Pengecekan anggota dilakukan dengan cara menunjukkan data atau informasi yang telah ditulis dalam format catatan lapangan atau transkrip wawancara, termasuk interpretasi peneliti terhadap data kepada informannya agar dikomentari untuk disetujui atau ditolak, bahkan mungkin ditambah atau dikurangi. Sedangkan diskusi teman sejawat dilakukan dengan mendiskusikan data dan temuan-temuan di lapangan dengan seorang atau lebih teman sejawat. Teman sejawat yang diajak diskusi adalah teman sejawat yang memiliki perhatian besar terhadap masalah yang sedang diteliti, serta memiliki pengetahuan yang cukup tentang metode penelitian.

Tahap-tahap penelitian dilakukan sebagai berikut: *Pertama*, dilakukan pengumpulan data pada masing-masing situs. *Kedua*, Data yang terkumpul dipelajari, disandi, dan dilaksanakan dengan melihat kategori-kategori yang dikembangkan dalam tema, sehingga berkembang menjadi suatu temuan yang konseptual yang bersifat tentatif.

Selanjutnya *ketiga*, berdasar atas temuan konseptual tersebut dilakukan analisis dengan melalui komparasi dan pengembangan konseptual yang dihasilkan. Dengan langkah-langkah ini diharapkan dapat diperoleh temuan konseptual yang lebih mantap dan dapat diabstraksikan. Untuk memperoleh temuan terakhir ini digunakan metode induksi analisis termodifikasi (*Modified analytic induction*) sebagai suatu cara untuk mengembangkan teori dan mengujinya (Bogdan & Biklen, 1998).

Metode induksi dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut: 1) pada awal penelitian dikembangkan definisi kasar dan fenomena tertentu; 2) membiarkan definisi dan penjelasan berlaku sampai diperoleh data yang terkumpul; 3) memodifikasi definisi dan penjelasan yang dirumuskan; 4) aktif mencari kasus-kasus yang terpikir yang tidak cocok dengan rumusan; dan 5) mendefinisikan kembali fenomena tersebut dengan menyusun kembali penjelasan sampai diperoleh satu hubungan yang sifatnya melengkapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses internasionalisasi perguruan tinggi, kebijakan internasionalisasi perlu dituangkan atau dimunculkan secara deklaratif dalam visi perguruan tinggi yang bersangkutan. Visi menurut Wibisono (2006: 43) merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau lembaga yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan *want to be* dari organisasi atau lembaga. Temuan ini melengkapi teori bahwa tata kelolaproses internasional perlu dijabarkan dalam sebuah misi yang dideklarasikan dalam sebuah statemen dan dapat menggunakan istilah yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan teori dalam penyusunan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan institusi bahwa untuk melaksanakan visi misi harus diturunkan dalam bentuk tujuan yang diuraikan secara rinci dan ketiga situs telah menetapkan tujuannya yang mengarah tidak saja pada tingkat nasional tetapi telah mendeklarasikan pada tataran internasional.

Kebijakan mutu (*Policy*) dituangkan dalam bentuk naskah dokumen yang berisi definisi, konsep, tujuan, strategi, berbagai standar mutu dan/atau standar mutu turunan, prioritas, dan sasaran mutu. Pedoman mutu (*manual*),

merupakan naskah/dokumen/buku yang berisi mekanisme perencanaan, penerapan, penendalian, dan pengembangan atau peningkatan standar mutu, pedoman atau petunjuk/instruksi kerja bagi pemangku kepentingan internal yang harus menjalankan mekanisme tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP No 19 tahun 2005). Namun Kebijakan Mutu yang ditetapkan oleh masing-masing situs memiliki ciri yang berbeda-beda, fokus kebijakan mutu sangat ditentukan oleh sudut pandang dan titik berat 'mutu' yang dipilih dari masing-masing situs, tetapi tetap diarahkan pada tataran internasional atau bahkan mendunia, sebagaimana dicontohkan salah satunya adalah mampu mengembangkan *integrasi-interkoneksi studi keislaman dan keilmuan*, menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia.

Tata kelola yang disusun dalam rangka proses internasionalisasi perguruan tinggi perlu dituangkan dan dijabarkan dalam bentuk visi, misi, tujuan dan rencana strategi, kebijakan mutu serta sasaran mutu. Meskipun visi, misi, tujuan dan rencana strategi yang digunakan oleh perguruan tinggi memiliki berbagai arah dan keragaman, serta target waktu pencapaian yang beragam. Dari kajian penelitian diperoleh temuan teoritik yang diformulasikan kedalam satu proposisi bahwa implementasi internasionalisasi perguruan tinggi perlu dituangkan dalam dokumen tata kelola, karena akan digunakan sebagai penuntun arah mencapai tujuan proses internasionalisasi.

Karena implementasi internasionalisasi memiliki keterkaitan antar bidang yang sangat luas dan tingkat integritas tinggi, serta memiliki dimensi yang sangat kompleks, maka program internasionalisasi perlu ditangani oleh lembaga/bidang/kantor/unit secara khusus, dimana lembaga ini memiliki tugas mengelola program internasional, menangani program kerjasama internasional, menjamin pelaksanaan kerjasama internasional yang lebih efektif dan efisien serta focus, pengkoordinasian dan pengembangan program internasional secara lebih luas, berfungsi untuk menangani kegiatan kerjasama yang melibatkan pihak luar negeri, pelaksana Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), menangani program bidang promosi serta sebagai pelaksana program kerjasama internasional. Pembentukan lembaga / bidang /

kantor / unit secara khusus ini dibentuk dengan maksud untuk mengantisipasi dan memenuhi perkembangan kebutuhan aktifitas program internasionalisasi yang semakin meluas dan memerlukan penanganan secara khusus, disamping karena unit yang telah ada sebelumnya memiliki keterbatasan dalam wewenang dan tanggungjawab. Unit baru ini dibentuk sebagai penyempurnaan Kantor Internasional yang ada sebelumnya.

Kurikulum dan proses pembelajaran yang dikembangkan dalam rangka internasionalisasi dalam tataran internasional memiliki berbagai keragaman. Keragaman tersebut meliputi nama matakuliah, sebaran matakuliah, jumlah sks, serta silabus dan buku literatur hingga proses pembelajaran dan model administrasi. Hal ini menjadi pelengkap dan memperluas teori bahwa dalam proses internasionalisasi salah satu aspek yang perlu dikembangkan adalah dilakukan perubahan kurikulum dalam hal ini internasionalisasi kurikulum, namun perubahan kurikulum (internasionalisasi kurikulum) sangat tergantung bagaimana program studi menentukan kebijakan.

Dengan demikian temuan ini memberi daya penjabaran dan peramalan yang lebih luas bahwa tata kelola yang disusun dalam rangka proses internasionalisasi perguruan tinggi dijabarkan dan dikawal dalam bentuk penjaminan mutu, penjaminan mutu yang digunakan oleh perguruan tinggi dalam tataran internasional memiliki berbagai keragaman, demikian juga proses membangun penjaminan mutu memiliki gaya yang berbeda-beda hingga perubahan orientasi dalam mengawal penjaminan mutu juga memiliki keragaman. Penjaminan mutu diarahkan pada pemanfaatan *Information Technology* (IT) sebagai sasaran utama, standar penjaminan mutu dibangun melalui standar ISO, dikembangkan dengan adanya keberanian untuk melakukan rekrutmen dosen luar negeri dan menerima mahasiswa asing, kebijakan kompetisi dilandasi pada tataran global dengan Perguruan Tinggi Asing, penjaminan mutu diawali melalui perubahan orientasi (*mainset*) yakni menggeser dari *Inward Looking* ke *Outward Looking* dengan menentukan target menjadi *World Class University*, dan Penjaminan mutu dilakukan dengan langkah-langkah dan strategi tertentu.

Kualitas luaran pendidikan tinggi dinyatakan sebagai daya saing luaran tersebut dalam memperoleh pengakuan dunia ilmu pengetahuan di tingkat internasional. Kualitas ini antara lain ditandai dengan kemampuan untuk menembus publikasi internasional, kemampuan lulusan bersaing di arena global dan kemampuan untuk memenangkan penghargaan akademik di tingkat internasional misalnya hadiah Nobel atau penghargaan yang lain. Relevansi di fihak lain mengukur tingkat kesesuaian antara produk yang dihasilkan perguruan tinggi (baik berupa lulusan maupun hasil-hasil penelitian maupun pengembangan) dengan kebutuhan fihak-fihak pengguna produk tersebut antara lain pemerintah, masyarakat maupun industri. Program perguruan tinggi yang relevan dan berkualitas ditandai dengan kemampuan lulusan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, menciptakan lapangan kerja baru, atau mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan pengetahuan secara global.

Temuan ini mendukung teori Scott P yang mengatakan bahwa, pertumbuhan permintaan terhadap perguruan tinggi secara internasional dan secara prinsip dipengaruhi oleh perubahan universitas-universitas secara alami pada era millenium baru, kemungkinan besar pilihannya adalah perluasan alokasi sumberdaya manusia yang dapat memberikan kecenderungan secara langsung, kemungkinan perluasan alokasi tersebut meliputi: 1) *internationalization of university*, yang meliputi penggunaan percakapan dalam bahasa Inggris terutama sekali pada negara-negara OECD, 2) *offshoure campuses* (kampus jarak jauh), 3) *technology* (kombinasi Teknologi Informasi/IT), 4) *university 21* (universitas abad 21), dan 5) *Accreditation and Quality Assurance* (akreditasi dan penjaminan mutu) dan 6) *A Vission of the Culture of University in the New Millenium* (Visi Budaya Universitas pada Era Millenium Baru). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa, keberlangsungan program internasionalisasi dikawal dengan berbagai program meliputi program penjaminan mutu, program kerjasama dengan perguruan tinggi asing, program penerimaan mahasiswa asing, dan program internasional (*international program*) program studi.

Kerjasama untuk mendukung proses internasionalisasi perguruan tinggi dilakukan melalui program-program pertukaran dosen (*lecturer exchange*), membangun program sukarelawan (*volunteer*), pertukaran mahasiswa (*student exchange*), membuka program *double degree*, dan kerjasama penelitian (*research collaboration*). Penemuan ini menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam proses internasionalisasi mengacu pada teori-teori yang ada atau yang berkembang, namun terdapat program-program yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam usaha melengkapi bentuk kerjasama yang ada, atau menjabarkan bentuk kerjasama yang lain dari bentuk kerjasama yang telah ada, misalnya program sukarelawan (*volunteer*), *volunteer* tidak harus berstatus mahasiswa tetapi orang asing yang mengikuti program dari salah satu organisasi/lembaga sukarelawan yang menjalin kerjasama dengan universitas, yang salah satu bentuk kegiatannya adalah mengajar bahasa dan ketrampilan kepada masyarakat di negara asing sebagai bagian dari kerjasama dengan universitas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan teori yang ada dan mencermati hasil temuan yang ada pada ketiga situs, maka agar perguruan tinggi dikenal sebagai perguruan tinggi dalam posisi tingkat dunia, perguruan tinggi perlu menyertakan diri dalam salah satu atau lebih perangkungan institusi/universitas dalam tataran dunia (*World University Ranking*), meskipun banyak lembaga dunia yang memberikan fasilitas dan kriteria berikut metodologinya, namun perguruan tinggi tidak serta merta mengikuti semua alternatif yang ditawarkan oleh semua lembaga dunia tersebut, tetapi memilih sesuai dengan apa yang telah dicapai pada saat itu dan sesuai dengan pendekatan yang diinginkan.

Reformasi institusi perguruan tinggi dari skala nasional ke tingkat nasional diimplementasikan oleh perguruan tinggi diperoleh temuan teoritik yang diformulasikan bahwa untuk menuju posisi perguruan tinggi tingkat dunia perlu ada program studi yang memperoleh akreditasi tingkat internasional (*International Accreditation*); pengembangan internasionalisasi melalui program Pengiriman dosen dalam seminar internasional sebagai pembicara; Penulisan jurnal

internasional; Program penyediaan *Guest house* yang diperuntukkan baik bagi mahasiswa maupun dosen asing; dan melakukan program *Leadership Visit*.

Kerjasama dilakukan melalui penandatanganan MoU, Pengembangan dilakukan melalui 'mahasiswa model' yaitu mahasiswa yang berada di luar negeri yang telah memiliki MoU dari program *Student exchange*, kemudian dikembangkan melalui kerjasama antar universitas melalui MoU, MoA dan MoI yang lebih luas. Dari program *student exchange*, kemudian dikembangkan menjadi kerjasama yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada pertukaran mahasiswa, tetapi kemudian dikembangkan kerjasama antar universitas dengan berbagai bentuk. Kerjasama direalisasikan dengan penandatanganan MoU, MoA dan MoI sebagai pengembangan lanjut dari program *Student exchange*.

Dari temuan *Benchmarking*, menunjukkan bahwa masing-masing situs berkeinginan menjadi perguruan tinggi bertaraf internasional, namun dalam implementasinya tidak mengkiplat secara khusus pada perguruan tinggi tertentu yang telah memiliki predikat *World Class University* (WCU). Tidak mengacu secara eksplisit kepada perguruan tinggi tertentu yang telah memiliki reputasi internasional. Meskipun mengarah pada perguruan tinggi tingkat dunia, namun masing-masing perguruan tinggi tetap memiliki obsesi untuk mempertahankan *ke-khas-an* tersendiri, membuat pola sendiri secara khusus, serta mempertahankan cita-citanya sendiri.

Dari temuan ini menunjukkan bahwa reformasi institusi perguruan tinggi dari skala nasional ke tingkat nasional, metodologi baku mutu (*Benchmarking*) yang digunakan oleh perguruan tinggi dalam tataran internasional memiliki berbagai keragaman, dari kajian penelitian diperoleh temuan teoritik yang diformulasikan sebagai berikut: standart yang digunakan dalam meraih predikat perguruan tinggi tingkat internasional menggunakan standart perankingan *Webometrics*, karena Publikasi *Web* dianggap lebih murah dan mampu mempertahankan standart tinggi dalam kualitas dari proses *peer review*. *Web* dapat menjangkau *audience* potensial yang lebih luas, mampu memberikan akses kepada *scientific knowledge*

bagi para peneliti dan institusi yang berada di negara-negaraberkembang.

Proses pemasaran (*Marketing*) yang dilakukan perguruan tinggi dalam rangka promosi dan publikasi dalam tataran internasional memiliki berbagai keragaman, dari kajian penelitian diperoleh temuan teoritik yang diformulasikan sebagai berikut: bahwa Proses pemasaran (*Marketing*) yang dilakukan dalam rangka promosi dan publikasi perguruan tinggi dalam tataran internasional tidak sesuai dengan teori yang ada, tetapi melengkapi teori yang ada. Hal ini ditunjukkan bahwa masing-masing situs tidak melakukan program pemasaran secara khusus untuk promosi mengenalkan perguruan tinggi secara internasional, tetapi program promosi dilakukan atau berlangsung secara terpadu dan bersifat alami. Perguruan tinggi dikenal oleh mahasiswa asing justru melalui calon mahasiswa asing yang datang ke universitas sebagai bagian peserta program *student exchange*, dari mahasiswa ini dikembangkan untuk proses penandatanganan MoU dengan perguruan tinggi dimana mahasiswa tersebut berasal. Program publikasi dilakukan melalui kegiatan yang bersifat akademik (program *sandwich*), dan kegiatan dilakukan tanpa melibatkan institusi. Program promosi luar negeri dilakukan berdasarkan atas undangan, acara diselenggarakan dan dibiayai oleh Dikti sebagai contoh promosi ke Turki, dan pameran didalam negeri yang diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tetapi peserta pameran berasal dari berbagai Negara.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tata kelola yang disusun dalam rangka internasionalisasi dijabarkan dalam bentuk: (a) visi, misi, tujuan dan rencana strategi, kebijakan mutu serta sasaran mutu berorientasi pada kualitas internasional; (b) pengelolaan program internasional secara umum diserahkan kepada suatu lembaga/bidang/kantor/unit yang secara khusus mengelola program internasional; (c) kurikulum dan proses pembelajaran yang dikembangkan disusun dengan model dan kecenderungan yang berbeda-beda; (d) tata kelola dalam rangka internasionalisasi dijabarkan dan dikawal dalam bentuk penjaminan mutu. (2) Reformasi institusi perguruan tinggi dari skala

nasional ke tingkat internasional: (a) implementasi yang dilakukan bersifat dinamis, *optional*, dan *never ending programme* artinya dasar dimulainya implementasi ditentukan oleh kebijakan, pandangan atau orientasi pimpinan dalam memandang posisi perguruan tingginya dalam tataran internasional; (b) implementasi kerjasama akademik dalam skala internasional dilaksanakan melalui program kerjasama dengan berbagai bentuk yang bervariasi; (c) *benchmarking* (metodologi baku mutu) tidak mengkiplat secara khusus atau tidak mengacu secara eksplisit pada perguruan tinggi tertentu yang telah memiliki reputasi internasional atau predikat *World Class University*; (d) proses pemasaran (*marketing*) tidak dilakukan secara khusus, tetapi berlangsung secara terpadu dan bersifat alami, mahasiswa asing dimanfaatkan sebagai media *marketing* secara tidak langsung.

Berdasarkan hasil penelitian, disampaikan saran dan rekomendasi sebagai berikut: Bagi pimpinan perguruan tinggi, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran dalam penerapan kebijakan internasionalisasi sesuai prinsip-prinsip dan substansi internasionalisasi. Bagi para penyelenggara institusi pendidikan tinggi, dalam pengembangan tata kelola setiap perguruan tinggi memiliki keragaman orientasi dalam mengaplikasikan internasionalisasi, maka melakukan reformasi perguruan tinggi tidak dapat ditunda-tunda lagi karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan Teknologi Informasi berkembang pesat menuntut perguruan tinggi menyesuaikan perkembangan tersebut. Bagi pemangku kepentingan terutama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Pelaksana Akreditasi perguruan tinggi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) serta Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis), hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan terutama dalam pengambilan kebijakan kerjasama akademik antar perguruan tinggi dalam lingkup internasional; kebijakan kualitas lulusan perguruan tinggi yang berorientasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan mampu berkompetisi minimal di tingkat ASEAN melalui bidang Internasionalisasi program studi, kurikulum, dan dosen; Program pertukaran dosen dan mahasiswa; Kolaborasi riset internasional hingga publikasi internasional; Kredit transfer, dan *double/dual degree*

program. Bagi para peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian dengan topik dan fokus yang berbeda pada subjek yang sama atau subjek berbeda tetapi fokus masalahnya sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Altbach, P. G. (2007). *Peripheries and centers: Research universities In developing countries*. In Jung Cheol Shin, *World class world wide: Transforming research universities in Asia and Latin America* (pp.1–28). Maryland: Johns Hopkins University Press.
- Bogdan, R.C & Biklen, S.K. 1992. *Qualitative Research for Education: Introduction to Theory and Methods*, Boston: Allyn and Bacon.
- Brojonegoro. S.S. 2003. *Long Term Strategy 2003 – 2010*. Ministry of Nasional Education Republic Indonesia.
- Chirzin.M. Habib. *Social Communication in an Islamic Pespective*”, dalam Eilers, franz Josef (ed). *Social Communication in Religious Traditions of Asia*. FABC-OSC Books. Vol 7, Manila, 2006.
- ‘The Right to Peace and Development: Avenue towards Cooperation’ in *Islamic Social Sciences, Indonesian Journal for Islamic and Social Issues*, Vol.1, No.1. 2008.
- Jalal, F., & Supriadi, D. (Eds.). (2001). *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adi Cita.
- Jiyono, Jalal, F., Syamsuddin, A., Syafruddin, D., Suparman, R., Ajisukmo, et al. (2001). *Menuju Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan Dasar*.
- Emmerson, D.K. (1978). *The Bureaucracy in Political Context: Weakness in Strength*. In K.D. Jackson & L. W. Pye (Eds.), *Political Power and Communications in Indonesia*. Berkeley: University of California Press.
- Filmer, D., Sayed, H., Boediono, Jiyono, Suwaryani, & Indriyanto. (1999). *Impact of Economic Crisis on Basic Education in Indonesia. Watching Brief: East Asia and the Pacific Region*(2), 1-4.
- David Warner and David Palmfremman. *Higher Education Management the Key*

- Elements*. The Society for Research into Higher Education & Open University Press.
- John L. Daniels dan Dr. N. Caroline Daniels: *Global Vision: Building New Models for the Corporation of the Future*, Mc Graw-Hill, Inc., New York, San francisco, Washington DC
- Jun Liu *College of Foreign Languages, NorthChina Electric Power University No 2, Beinong Road, Huilongguan, Changping District, Beijing 102206, China E-mail: liuj59@126.com* <http://dx.doi.org/10.5539/hes.v2n1p60>, diakses 8 Nopember 2012.
- Indarjit R.E, & Djoko Pranoto, R., *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Ka-ho Mok, 2005. The quest for world class university: Quality assurance and international benchmarking in Hong Kong. *Quality Assurance in Education*; 2005; 13, 4; ProQuest Research Library, pg. 277
- Knight, J. (2003). Updated internationalization definition, *International Higher Education*. 33,2-3.
- Knight, J. (2004). *Internationalization remodeled: Definition, approaches, and rationales. Journal of Studies in International Education*. 8,5-31. <http://dx.doi.org/10.1177/1028315303260832>, diakses 8 Nopember 2012
- Maringe, F. & Foskett, N. (2010). Introduction: Globalization and universities. In F. Maringe & N. Foskett. *Globalization and internationalization in higher education: theoretical, strategic and management perspectives* (pp.1-16). London/New York: Continuum International Publishing Group.
- Moeloeng, L.J. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Murray, Jacqueline, 2011. The Relevance and Utility of World Class Operations to the University of Guyana, *International Journal of Business and management*, (Online), Vol 6, No 1; Januari 2011, Published by Canadian Center of Science and Education (<http://www.ccsenet.org/ijbm>) diakses 8 Nopember 2012.
- Shin, J.C. 2009. Building World-class Research University: The Brain Korea 21 Project. (...)... (Online),
- Scott P. 2000. *Higher Education Re-Formed*. London and New York. Universitas Negeri Malang. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)* Jakarta.